

Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi Pengemis Di Kabupaten Pidie

Zulfikar^{1)*}, Mulyadi²⁾, Rozaili³⁾

^{1,3)} Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jabal Ghafur

²⁾ Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh

¹⁾zjolfikar@gmail.com, ²⁾mulyadi_mm@unimal.ac.id, ³⁾rozaili@unigha.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi Pengemis di Kabupaten Pidie. untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi Pengemis di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian dideskripsikan secara konkret sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini Dinas Sosial telah melakukan sejumlah tindakan untuk mengurangi jumlah pengemis di Kabupaten Pidie. Salah satu tindakan tersebut adalah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan razia rutin terhadap pengemis. Peraturan daerah (Qanun) dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan dari "Qanun" ini adalah untuk memastikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan tegas dalam memerangi pengemis di kabupaten Pidie. Adapun kekurangan dari program yang dijalannya Dinas Sosia sosial tidak bisa menjalankan program-program lain yang dinilai mampu mengurangi angka pengemis di Kabupaten Pidie. Masih banyak pengemis yang tidak mendapatkan efek jera terhadap razia yang telah didapatkan, sehingga hal ini menjadi kendala.

Kata Kunci: Pengemis, Program, Pembinaan

Abstract

The purpose of this study was to determine how the evaluation of the Social Service Development Program in Reducing Beggars in Pidie Regency. to determine what factors are obstacles to the Social Service Development Program in Reducing Beggars in Pidie Regency. This study uses a qualitative descriptive method, namely the results of the study are described concretely according to the events that occurred in the research object. The results of this study are that the Social Service has taken a number of actions to reduce the number of beggars in Pidie Regency. One of these actions is to work with the Civil Service Police Unit to conduct routine raids on beggars. Regional regulations (Qanun) are made by the Civil Service Police Unit. The purpose of this "Qanun" is to ensure that the Civil Service Police Unit will take firm action in combating beggars in Pidie Regency. The shortcomings of the program run by the Social Service cannot run other programs that are considered capable of reducing the number of beggars in Pidie Regency. There are still many beggars who do not get a deterrent effect from the raids that have been obtained, so this is an obstacle.

Keywords: Beggars, Program, Guidance

A. LATAR BELAKANG

Satu faktor penyebab meningkatnya jumlah pengemis adalah kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat tinggi tetapi tidak seimbang dengan penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Pengemis memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah dibandingkan dengan masyarakat umum, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain itu, pengemis tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan f "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara."

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha. Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 17 ayat (1) huruf g, Pasal 223 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penanganan masalah sosial merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut qanun yang perlu diperhatikan oleh dinas sosial yaitu:

1. Anak yang belum sampai usia 18 tahun
2. Orang tua lansia (lanjut usia) yang sudah mencapai 60 tahun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara materil, spiritual maupun social
3. Penyandang Disabilitas yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.
4. Penderita penyakit kronis yang menderita penyakit menahun atau kronis seperti kusta, Tuberculosis (TBC) paru, yang dinyatakan sembuh/terkendali, termasuk penderita HIV/AIDS dan stroke tapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/ wajar.
5. Gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian yang tidak tetap dan layak atau mereka sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berkeliaran di dalam kota dan makan minum di sembarang tempat.
6. Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum atau tempat lainnya melalui berbagai cara dan alasan untuk mengharap

belas kasihan orang lain.

Ada beberapa faktor penyebab gelandangan dan pengemis sbb:

1. Faktor Ekonomi; Kemiskinan adalah salah satu faktor yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini membuat seseorang lupa akan aturan yang melekat pada kemiskinan masyarakat, yang didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial sekelompok orang.
2. Faktor Lingkungan Keluarga; Permasalahan ini bisa diakibatkan karena ketidakcocokan atau sering dibilang tidak ada komunikasi antara keluarga dengan anggota.
3. Faktor Pendidikan: Muncul pengemis juga diakibatkan oleh masalah pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya bergantung pada ego pribadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain.
4. Faktor Sosial dan Budaya: Pengemis berasal dari lingkungan yang tidak teratur dan cenderung tidak pernah melakukan pekerjaan apa pun dan cenderung malas untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
5. Bahkan, mereka lebih suka menjadi pengemis untuk mendapatkan uang setiap hari tanpa memiliki bakat atau keterampilan khusus untuk bekerja.
6. Faktor lapangan pekerjaan kurangnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka persaingan dalam dunia pekerjaan yang kemudian beberapa diantaranya mengambil jalan pintas. Hal ini didukung dengan mempunyai keterampilan, dan didukung dengan kenyamanan yang diperoleh dari mengemis.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu wilayah di Aceh dengan angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 jumlah 84,53 jiwa masyarakat miskin. Tahun 2023 jumlah kemiskinan di Kabupaten Pidie mengalami peningkatan menjadi 86,79 jiwa. Hal tersebut memicu adanya pengemis, peningkatan jumlah penduduk miskin di Pidie menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah secara khusus.

Dari hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti, jumlah pengemis menjadi semakin mengalami kenaikan, ketidakhadiran pemerintah kabupaten Pidie dalam menertipkan pemengemis terutama pada simpang 5 (simpang aneuk mulieng) menjadi faktor utama pengemis lebih leluasa dalam melakukan tindakannya. Sejauh tahun 2023-2024 ini peneliti tidak melihat adanya razia rutin yang dilaksanakan oleh pihak terkait.

Dengan berkembangnya pengemis maka dikhawatirkan akan memberi peluang kepada pengemis sehingga munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta berpeluang terjadinya aksi kriminal, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu.

Padahal di sisi lain mereka adalah warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka perlu diberikan perhatian yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Evaluasi Program

Evaluasi merupakan penilaian terhadap data-data yang terkumpulkan.

Selain itu, evaluasi juga dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan. Evaluasi memiliki arti dalam menganalisis kebijakan karena masing-masing menunjukkan penggunaan berbagai nilai terhadap hasil program dan kebijakan. Secara umum, kata "evaluasi" dapat disamakan dengan istilah "penaksiran", "rating", dan "penilaian". Semua ini adalah istilah yang menggambarkan upaya untuk menganalisis hasil kebijakan dalam satuan nilainya. Dalam arti yang lebih khusus, evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi tentang nilai dan keuntungan dari hasil kebijakan. Saat hasil kebijakan sebenarnya memiliki nilai, itu karena mereka membantu mencapai tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah tercapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi, Dunn (2000).

Stufflebeam dan Shinkfield (2007) menyatakan bahwa: "*evaluation is a systematic investigation of some object's value*". Evaluasi adalah suatu investigasi, penelitian, penyelidikan, atau pemeriksaan yang sistematis terhadap nilai suatu objek. Sedangkan Sudjana (2008) memaknai evaluasi sebagai kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk masukan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang sedang dan/atau telah dilaksanakan. Produk evaluasi adalah tersusunnya nilai-nilai (*values*) seperti bermanfaat atau tidak bermanfaat, baik atau buruk, berhasil atau tidak berhasil, diperluas atau dibatasi, dilanjutkan atau dihentikan, dan sebagainya, mengenai program yang sedang atau telah dilaksanakan.

Pengertian evaluasi di atas dapat

didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk merencanakan pelaksanaan, memantau, menentukan, atau memberikan informasi tentang program kerja atau kegiatan yang dilakukan. Definisi ini berbeda-beda menurut para ahli. Adapun untuk mengevaluasi program, membuat keputusan, dan memastikan bahwa program telah mencapai tujuannya melalui pengambilan data sistematis.

Menurut Stufflebeam (2007) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Evaluasi program adalah proses menentukan nilai, tujuan, efektifitas, atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini didasarkan pada perbandingan bervariasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Ada empat hal penting yang ditekankan dalam evaluasi program seperti yang dikemukakan oleh Rossi dalam Totok Mardikanto & Poerwoko Soebianto (2013:269), yaitu:

- 1) Siapa (kelompok) penerima manfaat program, dimana lokasinya, dan bagaimana spesifikasi kelompok penerima manfaat program tersebut;
- 2) Apa metode yang terbaik yang akan diterapkan, demi tercapainya tujuan yang diinginkan;
- 3) Apakah program tersebut benar-benar konsisten dengan tujuan yang diinginkan;
- 4) Seberapa jauh peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan

Sedangkan disisi yang lain, adapun indikator keberhasilan dapat dilihat tingkat keberhasilan suatu program

adalah:

- 1) Program mendapat dukungan dari berbagai pihak baik bersifat material maupun imaterial.
- 2) Terlaksananya program lapangan yaitu program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik;
- 3) Program tepat sasaran artinya program digunakan oleh obyek yang menjadi sasaran program; d. Tercapainya tujuan program yaitu akhir dari rencana program yang telah dirumuskan

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat, evaluasi program adalah pengujian melalui pengukuran dan analisis sistematis terhadap cara-cara dan sejauh mana program mencapai tujuan yang direncanakan. Mulai proses pengumpulan data atau informasi ilmiah. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan untuk perbaikan program yang akan datang.

Ada dua fungsi evaluasi adalah formatif dan sumatif. Fungsi formatif melibatkan perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, seperti program, orang, produk, dan sebagainya. Fungsi sumatif melibatkan pertanggungjawaban, keterangan, seleksi, atau lanjutan. Dengan kata lain, evaluasi dimaksudkan untuk mendukung pengembangan, implementasi.

Mutrofin (2010:157) menyatakan tujuan evaluasi program adalah untuk mendapatkan informasi yang mungkin berguna padansaat memilih diantara berbagai kebijakan atau program alternatif untuk mencapai tujuansosial. Selanjutnya menurut Tayibnapis (2000:59) tujuan evaluasi dapat bermacam-macam, antara lain sebagai pekerjaan rutin atau tanggung jawab rutin untuk membantu pekerjaan

manajer dan karyawan dengan tujuan yang lebih banyak, dan informasi yang lebih lengkap dari yang sudah ada atau memberikan informasi untuk tim pembina atau penasehat, untuk klien, untuk dewan direktur atau pemberi dana atau sponsor.

Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa pakar yang disebutkan di atas. Informasi tersebut dapat mencakup proses pelaksanaan program, efek dan hasil yang dicapai, efisiensi, dan bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk program itu sendiri, yaitu untuk membuat keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan program. Selain itu, digunakan untuk penyusunan program berikutnya dan kebijakan yang terkait.

Oleh karena itu, tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program. Hasil evaluasi juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan lanjutan atau membuat keputusan.

2.Peranan

Peranan menurut Soekanto (2002:243) ialah merupakan salah satu aspek dinamis dalam kedudukan (status) individu khususnya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dari itu ia menjalankan suatu peranan yang melekat padanya.

Peranan juga merupakan alat yang melekat pada seorang individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa setiap orang memiliki peranan yang berbeda sesuai dengan kedudukannya dalam lingkungannya, baik itu lingkungan sosial atau organisasi. Kedudukan atau status seseorang dalam suatu kelompok atau lingkungan memberikan hak dan

kewajiban untuk melaksanakan peran yang diberikan kepadanya. Peranan adalah apa yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok untuk melakukan tugas dan menerima haknya. Seseorang yang memegang peran atau jabatan dalam lingkungan, organisasi, atau negara harus melakukannya sesuai dengan harapan Masyarakat. Setiap orang memiliki peran yang harus dimainkannya, seperti memutuskan apa yang akan dia lakukan untuk masyarakat dan kesepakatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat kepada generasi berikutnya.

Menurut Soekanto (dalam Rauf dan Munaf, 2015:281) peranan adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya Giroth (dalam Rauf dan Munaf, 2015:281) juga berpendapat hampir sama dengan Soekanto, bahwa “Peranan adalah merupakan sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagian tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting dalam system sosial yang bersangkutan dan harapannya sendiri dari suatu jabatan yang di dudukinya dalam sistem sosial tersebut.

Didasarkan pada berbagai defenisi di atas, dapat dikatakan bahwa peranan merupakan bagian dari sekumpulan fungsi yang dilakukan dan dimiliki seseorang dari kedudukannya atau statusnya dalam sistem sosial. Oleh karena itu, orang yang memiliki peranan diharapkan memenuhi kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya di masyarakat.

C. METODE

Penelitian pendekatan ini deskriptif menggunakan kualitatif. Penelitian dilakukan pada dinas sosial Kabupaten Pidie, masyarakat Pidie, serta

pengemis yang berada diwilayah Pidie.

Adapun dalam untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel penelitian, dan untuk pengambilan sumber data, peneliti berdasarkan standar yang telah ditetapkan, berikut ini sampel dalam penelitian yang akan dilakukan:

- a) 1 Orang kepala dinas sosial,
- b) 1 Orang sekretariat,
- c) 2 Orang bagian rehabilitasi sosial
- d) 2 Orang bagian pemberdayaan sosial
- e) 2 Orang bidang penanganan pakir miskin

Adapun sumber data yang didapatkan oleh peneliti melalui Data primer yang merupakan observasi, dan wawancara dan data sekunder yaitu dokumen, arsip, evaluasi, laporan, dan buku ilmiah Adapun analisis yang dilakukan peneliti diawali dengan mempelajari dan menganalisis semua sumber yang telah ditemukan, termasuk dokumentasi dan hasil wawancara secara acak.

Data yang belum teranalisis dikumpulkan kembali, kemudian melalui proses pemeriksaan ulang serta diproses kembali. Secara keseluruhan data yang telah terkumpul dicatat secara objektif sesuai dengan temuan dari hasil penelitian dan observasi lapangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) Pemerintah Aceh, Dinas Sosial Aceh mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023–2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Aceh, disusun sesuai tugas & fungsi serta berpedoman kepada RPA Aceh 2023-2026 dan merupakan dokumen publik yang

mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Pejabat Kepala Daerah Pemerintah Aceh periode 2023-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Aceh selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Dokumen ini juga akan menjadi acuan Dinas Sosial Aceh untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran. subjek Dinas sosial sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, Pekerjaan Sosial merupakan dinas di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan.

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) Pemerintah Aceh, Dinas Sosial Aceh mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Aceh, disusun sesuai tugas & fungsi serta berpedoman kepada RPA Aceh 2023-2026 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Pejabat Kepala Daerah Pemerintah Aceh periode 2023-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Aceh selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Dalam upaya menangani kasus pengemis tersebut pemerintahan dalam hal ini dinas sosial Kabupaten Pidie telah melaksanakan beberapa program kerja pemerintah untuk mengurangi angka peningkatan pengemis. Pemerintah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya pengurangan pengemis tersebut. beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah melakukan dengan rutin penertiban. penertiban dilakukan secara berkala. Kemudian pengemis tersebut

kemudian dibawa ke dinas sosial, dalam hal ini upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan adanya pembinaan, para pengemis yang terjaring razia dilakukan pembinaan dan diberikan bantuan terhadap mereka.

Pembinaan dilakukan dalam upaya pemerintah mengurangi pengemis. Namun beberapa sebagian dari mereka mendapatkan respon yang positif dan menerima efek jera sehingga sebagian dari mereka lebih mudah dalam melakukan pembinaan. Namun ada beberapa dari pengemis tersebut sudah terbiasa dan sudah menjadikan mengemis tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Beberapa dari mereka tersebut yang sangat sulit kita bina dan kita tertibkan.

Tindakan tegas telah kita sampaikan untuk memberikan peringatan terhadap mereka. Dalam penjelasannya pihak dinas sosial memberikan penjelasan tentang adanya qanun Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan menjadi acuan legalitas untuk Satuan Polisi Pamong Praja, qanun tersebut dilakukan dalam upaya legalitas tindakan tegas yang akan dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis, adapun isi dari qanun tersebut berupa pelarangan pengemis di seputaran persimpangan dan lampu merah yang berada di Kabupaten Pidie.

Ada beberapa rencana dinas sosial yang ingin dijalankan, beberapa rencana tersebut dinilai mampu mengurangi angka pengemis dijalan dan dinilai meningkatkan ekonomi kreatifitas di Kabupaten Pidie. Namun rencana tersebut masih belum terealisasikan, kendala anggaran dinas sosial menjadi alasan pertama belum terlaksanakannya rencana tersebut. kegiatan yang ingin dijalankan tersebut merupakan suatu bentuk pelatihan pemberian materi tentang keterampilan tangan, keterampilan ini diharapkan

mampu menjadi mata pencaharian

No	Jenis Layanan	Keterangan
1.	Razia Rutin	Merupakan program rutin dalam rangka mengurangi pengemis
2.	Pembinaan	Meningkatkan pemahaman pengemis tentang efek negatif dari mengemis
3.	Qanun Satpol PP	Upaya tindakan untuk melegalkan Tindakan tegas yang akan disampaikan oleh satpol PP terhadap pengemis

Adapun beberapa tanggapan masyarakat yang berbeda-beda mengenai pengemis di Kabupaten Pidie. Ismail selaku masyarakat yang berkegiatan di warung kopi menjelaskan, keberadaan pengemis dan pengamen di arena warung kopi dan tempat keramaian sudah sangat meresahkan masyarakat.

Keberadaan mereka sudah sangat menjadi suatu permasalahan dalam lingkungan sosial. Ketidapatuhan dan kesewenang-wenangan pengemis serta pemerintah dalam hal ini dinas sosial serta Satuan Polisi Pamong Praja yang dinilai tidak menjalankan tugas secara maksimal. Menjadi faktor utama peningkatan jumlah pengemis di warung-warung kopi dan tempat keramaian.

Dari narasumber mengatakan, peningkatan jumlah pengemis di Kabupaten Pidie tidak terlalu signifikan. Namun peningkatan jumlah tersebut menjadi penilaian masyarakat terhadap sistem kinerja pemerintah dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu mengurangi jumlah pengemis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut data sejumlah pengemis yang semakin meningkat tidak hanya didasari oleh peningkatan jumlah pengemis. Namun keberanian dan

keberadaan pengemis yang telah berani memasuki arena warung kopi dan tempat-tempat keramaian, keberadaan para pengemis tersebut telah menjadi sorotan dan konsumsi Kabupaten Pidie.

Publik di wilayah masyarakat merupakan elemen utama dalam berkehidupan sosial, kesenjangan yang terjadi akibat dari adanya peningkatan pengemis menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah, penurunan jumlah pengemis dan meratakan kesejahteraan masyarakat menjadi salah tugas dan tanggungjawab pemerintah. faktor yang menjelaskan tingkat kemakmuran dan kemajuan suatu wilayah.

Keresahan masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengemis yang dinilai agresif oleh masyarakat menjadi tantangan yang perlu perhatian lebih dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil perolehan data keresahan menjadi semakin meningkat disebabkan oleh arogansi pengemis, tindakan mereka yang memaksa diberikan sumbangan. Selain dari keresahan, Ismail menambahkan merasakan rasa kekhawatiran terhadap ana- anak yang ikut serta dalam mengemis, aktivitas yang dijalankan sampai tengah malam menjadi rasa peduli oleh masyarakat akan keselamatan dan kenyamanan anak tersebut.

Tindakan pengamen yang pengemis telah dan berani mengganggu kenyamanan dan telah menjadi keresahan masyarakat tidak menjadi kesalahan pengemis, namun neresumber mempertanyakan program program pihak yang berwenang dalam menertibkan dan memberdayakan para pengemis tersebut, narasumber mengatakan permasalahan pengemis telah memiliki pihak yang berwenang dalam mengatasi hal tersebut,

peningkatan dan keresahan yang ditimbulkan para pengemis menjadi suatu tolak ukur program pemerintah yang tidak efektif.

Pengemis merupakan masyarakat yang masuk dalam salah satu permasalahan diperhatikan pemerintah. secara yang perlu khusus oleh Peningkatan jumlah Pengemis disebabkan oleh kurangnya bentuk perhatian pemerintah, keberadaan pengemis didasari oleh beberapa faktor. Beberapa faktor penyebab peningkatan jumlah pengemis adalah pertama: ekonomi, kedua: social, ketiga: lingkungan keempat: kurangnya bentuk perhatian pemerintah. Pengemis telah menjadi salah satu lahan atau tempat yang dijadikan sebagai tempat mata pencaharian, pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak seimbang merupakan permasalahan sehingga beberapa utama, masyarakat mengambil jalan pintas serta cepat dengan meminta-minta (mengemis).

Keadaan tersebut menjadi semakin meningkat dengan kurangnya perhatian pemerintah, ini dikarenakan dalam hal penertiban oleh pemerintah tidak memiliki wewenang dalam aturan secara khusus, sehingga masyarakat yang telah menjadikan mengemis sebagai tempat mata pencaharian menjadi semakin semen-mena dan tidak beraturan.

Kebutuhan ekonomi menjadi penyebab utama dari terjun di jalan dan meminta-minta, tanggungan yang berat serta tidak adanya perhatian suami terhadap nafkah serta bantuan Desa yang tidak mencukupi menjadi alasan utama berada di jalan dan diwarung warung. Pada sesi wawancara bersama dengan narasumber terakhir terhadap pengemis, kebutuhan hidup merupakan permasalahan utama yang menjadikan setiap masyarakat menjadikan mengemis sebagai jalan utama dalam menyelesaikan masalah keuangan.

Namun ketegasan pemerintah dalam mengelola permasalahan pada masyarakat menjadi hal utama terhadap penyelesaian pengemis di Kabupaten Pidie.

Peneliti melihat pengemis yang telah diwawancarai merasa telah nyaman pada dunia meminta-minta tersebut. Penghasilan yang didapatkan dari mengemis serta kemudahan yang diperoleh telah membentuk suatu pola yang mudah dalam mencari nafkah, kenyamanan yang diperoleh membuat pengemis betah dan semakin meningkat.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diberikan Kesimpulan sebagai berikut:

Program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam upaya mengurangi jumlah pengemis di Kabupaten Pidie menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan program, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Kekurangan dana untuk menangani program pembinaan menjadi masalah utama, sehingga Dinas Sosial hanya dapat bergerak dan menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah. Selain kendala anggaran, pola pikir para pengemis juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak dari mereka yang telah menjadikan aktivitas mengemis sebagai sumber mata pencaharian utama karena dianggap memberikan kenyamanan dan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Faktor-faktor inilah yang menjadi pendorong utama mereka untuk terus melakukan praktik mengemis. Di sisi lain, upaya penertiban dan tindakan tegas yang dilakukan pemerintah terhadap para pengemis dinilai belum efektif, karena

tidak memberikan efek jera yang signifikan, sehingga sebagian dari mereka tetap kembali mengemis meskipun telah ditindak..

2. Rekomendasi

Dinas Sosial Kabupaten Pidie harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program pembinaan bagi para pengemis. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap pembinaan sosial dan keagamaan agar para pengemis dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan yang mendukung perubahan perilaku.

Selain itu, pelatihan yang menyeluruh juga sangat diperlukan guna membekali mereka dengan kemampuan yang dapat digunakan untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Sebagai bagian dari upaya menekan jumlah pengemis di Kabupaten Pidie, pemerintah juga perlu menerapkan aturan khusus yang mencegah keterlibatan para pengemis dalam kegiatan sehari-hari di ruang publik, sehingga dorongan untuk kembali mengemis dapat diminimalisir.

REFERENSI

- Anggara Sahya Anggara, 2018, Kebijakan Publik, CV Pustaka Setia: Bandung Badjuri,
- Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip Press : Semarang
- Ardiyuanda, A dan Husni Teja Sukmana dan Arief (2008), implementasi 0-1 knapsack menggunakan algoritma Dynamic programming pada aplikasi perhitungan Harga satuan produk percetakan berbasis web (studi kasus: cv tunas utama). Jurnal InforSAINS Vol 2, No. 3 Nopember 2008, ISSN 1412 9116.
- Awaluddin, A., & Zulfikar, Z. (2020). Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 10(2), 94-104.
- Anggara Sahya Anggara, 2018 Kebijakan Publik, CV Pustaka Setia : Bandung Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh, AL IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science.
- Bastian Bustami & Nurlela. (2006). Akuntansi Biaya : Kajian Teori dan Aplikasi.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Erutan Agas Punu Anto, 2017, Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3.
- Hayat, 2018, Kebijakan Evaluasi, Reformasi, Publik dan Formulasi, Intrans Publishing : Malang.
- Huda, Miftahul, 2009, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Mardalis, 2014, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Mutrofin. (2010). Evaluasi Program Teks

- Pilihan Untuk Pemula. Bandung: Laksbang Pressindo.
- Muhamad Jupri (2014) Upaya Badan Kepegawaian Daerah Dalam Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tana Tidung, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol . 2 No. (2)
- Mulyadi. (2015). Implementasi Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pramono, J. Implementasi Publik (2020). (Sutoyo Studi Kebijakan (ed.)). Surakarta: UNISRI Press.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation, Theory, Models, and Application. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Sugiono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- Prasetyowati, M. I. dan Wcaksana, Arya. (2013) “Implementasi Algoritma Dynamic Programming untuk Multiple Constraints Knapsack Problem”. Skripsi. Tangerang: Fakultas Teknik Universitas Multimedia Nusantara.
- Lukas S. Musianto, (2014) “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian”, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 4.2
- Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, Roni Budi, Nurahman Joko Wiryanu. Dkk. Pr Rutgers 2017. Pendamping Materi Desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta Selatan: Kementerian Desa. PDTT Republik Indonesia.
- Tayibnapi, F. Y. (2000). Evaluasi Program. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Triyanto, Deni 2018. Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi kasus di desa Taba Jambu Kecamatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
- Widiarta, Agus. 2015. Efektifitas Tenaga Pendamping profesional dalam Pemanfaatan Dana Gampong Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Gampong. *Jurnal FISIP UPN*
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia.
- Zulfikar, Z. (2021). Peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan fungsional (Studi di Puskesmas Simpang Tiga Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 11(2), 119-129